

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Legitimacy Theory***

*Legitimacy theory* merupakan salah satu kerangka teoritis paling berpengaruh dalam literatur akuntansi sosial dan lingkungan. Teori ini berakar dari konsep 'kontrak sosial' (*social contract*) antara perusahaan dengan masyarakat, yang menjelaskan bahwa operasional perusahaan hanya dapat dipertahankan apabila masyarakat menilai bahwa nilai-nilai, norma, dan perilaku perusahaan tersebut selaras dengan sistem nilai sosial yang berlaku (Suchman, 1995). Ketika terjadi kesenjangan antara perilaku aktual perusahaan dengan ekspektasi masyarakat yang dikenal sebagai *legitimacy gap* maka perusahaan menghadapi ancaman hilangnya legitimasi yang dapat berujung pada sanksi sosial, regulasi yang lebih ketat, atau bahkan penolakan publik terhadap kegiatan usahanya.

Deegan, (2002) menegaskan bahwa tekanan legitimasi dari masyarakat dan regulator merupakan pendorong utama bagi entitas bisnis yang bergerak di sektor dengan dampak lingkungan yang besar seperti energi, pertambangan, dan manufaktur untuk secara proaktif mengungkapkan informasi emisi sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Argumen ini diperkuat oleh Cho & Patten, (2007) yang secara empiris membuktikan bahwa perusahaan dengan eksposur lingkungan lebih besar secara konsisten menghasilkan tingkat pengungkapan lingkungan yang lebih tinggi, bukan semata karena kewajiban normatif, melainkan karena pengungkapan tersebut berfungsi sebagai instrumen

strategis untuk meredam tekanan publik dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, keterbukaan informasi terkait emisi karbon membawa makna yang lebih luas daripada sekadar perwujudan kewajiban ekologis, tetapi juga merupakan mekanisme aktif dalam manajemen reputasi korporat.

Proses pencapaian legitimasi melalui pengungkapan lingkungan dapat dipahami melalui strategi legitimasi yang dirumuskan Lindblom, (1994). Pertama, pendidikan dan informasi, yakni perusahaan secara aktif menyampaikan informasi mengenai upaya pengendalian emisi kepada publik dengan tujuan membentuk ulang persepsi masyarakat secara substansial. Kedua, perubahan persepsi, yaitu perusahaan berupaya memengaruhi cara pandang pemangku kepentingan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan tanpa harus mengubah perilaku operasional aktualnya. Ketiga, pengalihan perhatian (*symbolic decoupling*) perusahaan secara selektif menonjolkan aspek-aspek positif dari praktik lingkungannya guna mengimbangi citra negatif yang timbul akibat aktivitas intensif karbon.

Relevansi *legitimacy theory* dalam pengungkapan emisi karbon semakin dikukuhkan oleh sejumlah studi empiris kontemporer. Gerged *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa tekanan legitimasi mendorong perusahaan menghasilkan pengungkapan lingkungan sukarela yang lebih luas. Siddique *et al.*, (2021) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pengungkapan karbon secara sukarela merupakan salah satu strategi utama perusahaan global dalam mempertahankan legitimasi sosialnya, mengingat masyarakat cenderung memberikan sanksi kepada perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab iklimnya. Liu *et al.*, (2023) secara empiris membuktikan bahwa perusahaan dengan

tingkat emisi karbon tinggi justru cenderung meningkatkan intensitas pengungkapannya sebagai proses legitimasi komunikatif guna mengelola ancaman legitimasi dan melindungi nilai perusahaan di hadapan tekanan regulasi dan institusional. Kılıç, M., & Kuzey, (2019) menambahkan bahwa dalam negara berkembang, atribut tata kelola korporasi berperan signifikan dalam menentukan kedalaman pengungkapan emisi karbon, yang mencerminkan respons strategis terhadap ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin kompleks. Keseluruhan bukti empiris ini menegaskan bahwa *legitimacy theory* tetap menjadi kerangka penjas yang kuat dan relevan dalam memahami perilaku pengungkapan GRK perusahaan.

## **2.1.2 Carbon Emission Disclosure**

### **2.1.2.1 Emisi Karbon**

Secara umum, konsep emisi karbon merujuk pada proses terlepasnya gas bermuatan karbon terutama berupa karbon dioksida menuju atmosfer, baik yang dipicu oleh siklus alam maupun faktor aktivitas manusia. Dokumen dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2021) menegaskan bahwa jenis emisi ini merupakan kontributor paling dominan dalam kelompok GRK yang menggerakkan perubahan iklim global. Dalam praktiknya, parameter emisi tidak terbatas pada unsur (CO<sub>2</sub>) saja, melainkan juga dipresentasikan lewat satuan *karbon dioksida ekuivalen* (CO<sub>2</sub>e) demi menyetarakan daya pemanasan global yang ditimbulkan oleh gas lain seperti *metana* (CH<sub>4</sub>) dan *dinitrogen oksida* (N<sub>2</sub>O). Penumpukan konsentrasi karbon di atmosfer menciptakan lapisan yang

memerangkap radiasi inframerah, yang secara teoritis dikenal sebagai mekanisme pemanasan sistemik pada permukaan bumi.

Secara fundamental, teori emisi karbon berkaitan erat dengan gangguan pada siklus karbon alami bumi. Karbon secara dinamis berpindah antara atmosfer, daratan, dan lautan namun, aktivitas industrialisasi yang masif telah melepaskan karbon yang sebelumnya tersimpan selama jutaan tahun dalam bentuk bahan bakar fosil secara instan ke atmosfer. Penelitian oleh Forster *et al.*, (2023) dalam jurnal *Earth System Science Data* mengungkapkan bahwa emisi karbon global dari bahan bakar fosil terus mencapai rekor tertinggi, yang melampaui kemampuan serap alami hutan dan samudra (*carbon sinks*). Ketidakseimbangan ini menyebabkan akumulasi residu karbon yang bersifat persisten, molekul CO<sub>2</sub> dapat bertahan di atmosfer selama ratusan hingga ribuan tahun, memberikan dampak pemanasan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sumber utama emisi karbon secara teoritis diklasifikasikan ke dalam sektor energi, proses industri, dan penggunaan lahan. International Energy Agency (IEA, 2024) mencatat bahwa pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk kebutuhan listrik serta transportasi tetap menjadi kontributor dominan. Selain pembakaran langsung, emisi juga dihasilkan melalui dekomposisi organik dan perubahan tata guna lahan, seperti deforestasi yang menghilangkan biomassa penyerap karbon. Secara teknis, setiap aktivitas ekonomi yang melibatkan konversi energi fosil dipastikan akan menghasilkan jejak karbon (*carbon footprint*), yang besarnya bergantung pada intensitas karbon yang dihasilkan oleh konsumsi daya energi dalam menunjang kegiatan operasional tersebut.

Dampak biofisika dari emisi karbon dijelaskan melalui peningkatan suhu rata-rata global yang memicu iklim yang ekstrem. Peningkatan konsentrasi karbon di atmosfer kini telah melampaui ambang batas kritis 400 *parts per million* (ppm), sebuah level yang belum pernah tercapai dalam sejarah manusia (IPCC, 2021). Forster *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa peningkatan ini berkorelasi langsung dengan percepatan pencairan es kutub, kenaikan permukaan air laut, dan asidifikasi samudra. Samudra menyerap sekitar seperempat dari emisi CO<sub>2</sub> antropogenik, yang mengakibatkan perubahan kimiawi air laut dan mengancam ekosistem terumbu karang. Oleh karena itu, emisi karbon dipandang bukan sekadar residu kimia, melainkan determinan utama dalam stabilitas ekologi global.

#### **2.1.2.2 Carbon Emission Disclosure**

Pengungkapan emisi karbon dijelaskan sebagai proses pelaporan secara sukarela maupun wajib mengenai jumlah gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh suatu entitas bisnis dalam periode tertentu. Konsep ini berkembang seiring meningkatnya tekanan regulasi internasional dan kesadaran pemangku kepentingan terhadap dampak perubahan iklim. Pengungkapan emisi karbon adalah potongan integral dari pelaporan keberlanjutan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan sekaligus membentuk data yang relevan bagi investor dan masyarakat. Perusahaan diharapkan tidak hanya melaporkan volume emisi yang dihasilkan, tetapi juga strategi mitigasi dan target pengurangan emisi jangka panjang yang telah ditetapkan (Luo *et al.*, 2021)

*Carbon Emission Disclosure* (CED) dapat dipahami sebagai mekanisme pelaporan terstruktur yang memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan

besaran emisi karbon dari aktivitas operasionalnya kepada publik dan pemangku kepentingan. Kualitas CED tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan data kuantitatif emisi, melainkan juga oleh kedalaman pengungkapan mengenai risiko iklim, tata kelola lingkungan, serta komitmen strategis perusahaan dalam pencapaian target pengurangan emisi jangka panjang. Choi *et al.* (2013) mengembangkan instrumen pengukuran CED berbasis 18 item indikator yang mencakup aspek kebijakan, target, inisiatif, dan verifikasi emisi karbon, yang hingga kini masih banyak digunakan sebagai proksi pengukuran kualitas CED dalam berbagai penelitian empiris di berbagai negara.

Pada tingkat global, hubungan antara CED dan pencapaian keuangan korporasi telah menjadi perhatian yang terus berkembang dalam literatur akuntansi dan keuangan. Wang (2023) melalui kajian komprehensif terhadap 78 studi empiris menemukan bahwa risiko karbon memberikan dampak merugikan yang signifikan bagi perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, sementara pengungkapan karbon terbukti mampu menyediakan informasi yang berguna bagi pelaku pasar untuk mengelola risiko iklim secara lebih efektif, dengan dampak keuangan yang dikategorikan ke dalam kinerja keuangan, relevansi penilaian pasar, biaya modal, dan profil risiko perusahaan.

Di Indonesia sendiri, CED masih bersifat *voluntary* sehingga tidak seluruh perusahaan menjelaskan informasi tersebut pada laporan maupun web perusahaan (Probosari & Kawedar, 2019). Sebagai langkah konkret, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundang POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mengatur tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan. Regulasi ini mengikat institusi finansial,

perusahaan publik, serta emiten untuk mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) mengenai transparansi volume pembuangan gas karbon diwajibkan hadir sebagai parameter krusial dalam mengukur performa kepedulian lingkungan korporasi. Penguatan instrumen ini juga diperkokoh oleh eksistensi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diinisiasi dan diawasi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **2.1.3 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan menggambarkan skala atau ruang lingkup operasi yang dijalankan oleh suatu entitas bisnis, dan indikator pengukurannya secara umum diproksikan melalui total aset yang dimiliki (Dang *et al.*, 2018). Skala ini kerap dijadikan instrumen untuk mengukur kapasitas serta kecukupan sumber daya internal perusahaan dalam menopang aktivitas operasionalnya secara berkelanjutan. Secara umum, klasifikasi perusahaan ke dalam skala kecil, menengah, dan besar di pasar modal Indonesia merujuk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya yang diatur dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2020. Penggolongan tersebut didasarkan pada ketentuan mengenai batasan total aset emiten yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Ukuran perusahaan memegang peranan penting dalam menentukan keterbukaan serta akuntabilitas pelaporan informasi suatu perusahaan. Perusahaan berskala besar memikul tanggung jawab yang lebih tinggi untuk mendistribusikan data performanya kepada masyarakat luas, baik melalui laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan, dan umumnya memiliki kapabilitas pendanaan serta fasilitas

yang lebih memadai untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengungkapkan informasi secara komprehensif dibandingkan perusahaan kecil. Selaras dengan pandangan Choi *et al.*, (2013), perusahaan berskala luas memiliki ketahanan finansial yang lebih kuat untuk menanggung pengeluaran terkait administrasi, penyusunan, hingga publikasi informasi, sehingga mendorong manajemen untuk menyajikan keterbukaan informasi secara lebih mendalam.

#### **2.1.4 Profitabilitas**

Profitabilitas mencerminkan kapabilitas finansial yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis dalam memproduksi laba atau keuntungan material pada rentang kurun waktu tertentu. Pandangan Brigham dan Houston (2019), indikator ini direpresentasikan sebagai *output* akhir dari perpaduan berbagai kebijakan operasional serta keputusan strategis pihak manajemen yang mengukur sejauh mana korporasi mampu menciptakan pendapatan neto yang melampaui total pengeluaran biaya fungsionalnya. Profitabilitas pada umumnya yang dimanfaatkan oleh kalangan analis serta pemodal dalam rangka mengevaluasi seberapa efisien suatu korporasi mengelola sumber dayanya dalam rangka menghasilkan keuntungan, dan hasilnya dibandingkan dengan korporasi serupa dalam bisnis yang sama maupun kinerja perusahaan pada periode sebelumnya (Ross *et al.*, 2019)

Terdapat beberapa proksi yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas, di antaranya *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Return on Investment* (ROI), dan *Net Profit Margin* (NPM). ROA mengukur Kemampuan entitas bisnis dalam memproduksi keuntungan bersih melalui pemanfaatan seluruh kekayaan atau aset yang dikuasainya dapat diukur dengan

membagi perolehan laba neto terhadap akumulasi total aset korporasi (Brigham & Houston, 2019). Di sisi lain, indikator *Return on Equity* (ROE) merefleksikan besaran tingkat pengembalian yang didistribusikan kepada para penanam modal atas kapital yang telah disetorkan, sehingga instrumen ini mampu menyajikan sudut pandang yang lebih mendalam mengenai efektivitas operasional berbasis ekuitas internal (Ross *et al.*, 2019).

Dalam penelitian ini, ROA (*Return on Assets*) dipilih sebagai proksi pengukuran profitabilitas karena kemampuannya dalam mencerminkan efisiensi manajemen secara menyeluruh dalam mendayagunakan aset tanpa terpengaruh oleh struktur modal perusahaan (Brigham & Houston, 2019). ROA yang tinggi menandakan bahwa entitas bisnis mampu mendayagunakan asetnya secara efisien untuk mendatangkan profit (Kasmir, 2019). Kondisi ini pada umumnya dikaitkan dengan kapasitas finansial yang lebih besar untuk menginvestasikan sumber daya pada berbagai program pengungkapan sukarela, termasuk pelaporan emisi karbon kepada publik dan pemangku kepentingan, karena perusahaan yang lebih profitabel mampu menanggung biaya pengungkapan dan berinvestasi pada teknologi rendah emisi (Chithambo & Tauringana, 2014).

### **2.1.5 Leverage**

*Leverage* menggambarkan seberapa besar perusahaan mengandalkan utang dalam struktur pendanaan operasional dan asetnya. Brigham dan Houston (2019) mendefinisikan *leverage* keuangan sebagai penggunaan beban tetap dalam struktur modal perusahaan yang bertujuan memperbesar potensi pengembalian bagi pemegang saham, namun sekaligus meningkatkan risiko finansial apabila kondisi

bisnis memburuk. Pandangan ini sejalan dengan Gitman dan Zutter (2015) serta yang menyatakan bahwa *leverage* menciptakan efek pengungkit (*magnification effect*) terhadap laba, di mana keuntungan maupun kerugian pemegang saham terakselerasi seiring meningkatnya proporsi utang. Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi berarti sebagian besar asetnya dibiayai oleh kewajiban eksternal, sehingga menanggung beban bunga dan kewajiban pelunasan yang lebih besar dibandingkan korporasi yang bergantung pada modal sendiri (Kasmir, 2019; Fahmi, 2018). Pengukuran *leverage* dapat dilakukan melalui *Debt to Assets Ratio* (DAR) maupun *Debt to Equity Ratio* (DER) (Kasmir, 2019; Hery, 2018), yang menurut Ross *et al.* (2019) dan Sartono (2016) menyajikan informasi krusial mengenai kapabilitas perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka panjang serta tingkat ketergantungannya terhadap pendanaan eksternal.

Dalam penelitian ini, *leverage* diukur menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) yang membagi total utang dengan total aset perusahaan (Kasmir, 2019). Pengukuran ini dipilih karena mampu mencerminkan proporsi aset korporasi yang dibiayai oleh kewajiban secara menyeluruh, sehingga memberikan gambaran risiko finansial yang lebih komprehensif (Hery, 2018; Fahmi, 2018). Perusahaan dengan rasio DAR tinggi umumnya berada di bawah pengawasan ketat kreditur dan pemangku kepentingan eksternal. Dalam konteks pengungkapan lingkungan, tingkat *leverage* yang tinggi secara teoritis dapat memberikan pengaruh dua arah terhadap pengungkapan emisi karbon secara sukarela, di satu sisi mendorong perluasan pengungkapan untuk mereduksi asimetri informasi dengan kreditur (Clarkson *et al.*, 2008), namun di sisi lain kreditur justru dapat menekan perusahaan

agar memfokuskan alokasi dana pada kewajiban finansial seperti pembayaran bunga dan pelunasan utang, bukan pada pengungkapan sukarela (Choi *et al.*, 2013).

### 2.1.6 Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansial jangka pendeknya tepat waktu dengan memanfaatkan aset yang dimiliki tanpa harus melikuidasi aset jangka panjang secara terpaksa (Kasmir, 2017). Brigham dan Houston (2019) mendefinisikan likuiditas sebagai ukuran seberapa cepat aset perusahaan dapat dikonversi menjadi kas guna memenuhi tagihan yang jatuh tempo, sehingga perusahaan tetap mampu beroperasi secara normal tanpa terganggu oleh tekanan kewajiban jangka pendek yang tidak terpenuhi. Tingkat likuiditas yang memadai menjadi perhatian utama bagi berbagai pihak, mulai dari kreditur yang ingin memastikan kemampuan bayar jangka pendek, hingga investor yang memandang likuiditas sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan (Ross *et al.*, 2019). Selain itu, likuiditas juga dapat dipahami sebagai bentuk sumber daya cadangan atau dana lebih yang dimiliki perusahaan. (Lestari *et al.*, 2025) menjelaskan bahwa cadangan likuiditas dapat dialokasikan perusahaan untuk mendukung inisiatif ramah lingkungan seperti efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon, sehingga perusahaan dengan posisi likuiditas yang sehat pada dasarnya memiliki fleksibilitas dana yang lebih besar untuk membiayai kegiatan pengungkapan sukarela.

Pada praktiknya, evaluasi terhadap tingkat likuiditas perusahaan diukur lewat beberapa jenis rasio finansial. Pendekatan pertama adalah *current ratio*, yaitu formula yang membandingkan total aset lancar terhadap liabilitas lancar guna

menggambarkan kapasitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan mengandalkan seluruh aktiva lancar yang dimiliki (Munawir, 2014). Instrumen kedua, yakni *quick ratio*, mengeliminasi unsur persediaan dari total aset lancar atas dasar pertimbangan bahwa perputaran persediaan menjadi uang tunai memerlukan waktu yang relatif lama dan fluktuatif, sehingga rasio ini menyajikan indikasi likuiditas yang lebih konservatif. Terakhir, *cash ratio* berfokus hanya pada kas beserta instrumen setara kas sebagai elemen dengan tingkat likuiditas tertinggi, menjadikannya parameter ukur yang paling ketat di antara ketiganya (Gitman & Zutter, 2015). Dalam penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan *current ratio* karena kemampuannya memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan jangka pendek perusahaan, dan merupakan indikator yang paling dominan digunakan dalam riset empiris di bidang akuntansi keuangan serta keterbukaan pelaporan keberlanjutan (Munawir, 2014).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Kajian akademis yang mengulik determinan pengungkapan emisi karbon CED mengalami eskalasi yang signifikan pada beberapa tahun. Perkembangan ini dipacu oleh makin kuatnya desakan global terkait akuntabilitas perubahan iklim serta manajemen lingkungan di sektor korporasi. Berbagai riset empiris telah dilaksanakan lintas negara menggunakan variasi objek, jenis industri, maupun rentang waktu observasi yang berbeda, sehingga memicu inkonsistensi hasil temuan. Adanya disparitas dalam sistem kelembagaan, kebijakan regulasi, serta iklim pasar modal disinyalir menjadi pemicu munculnya perbedaan konklusi

tersebut menjelaskan mengapa hasil penelitian tentang determinan CED kerap menunjukkan ketidakkonsistenan.

Inkonsistensi hasil dari sejumlah studi terdahulu menjadi salah satu dorongan utama diadakannya riset ini. Maka dari itu, telaah literatur secara sistematis diterapkan untuk mengklasifikasikan temuan-temuan empiris terdahulu yang menguji korelasi antara skala perusahaan, profitabilitas, *leverage*, serta likuiditas terhadap *Carbon Emission Disclosure* (CED). Langkah pemetaan ini krusial demi memastikan riset ini mampu menyumbangkan kontribusi riil dalam menjembatani kesenjangan ilmiah (*research gap*) yang masih ada.

### **1. Penelitian terkait Ukuran Perusahaan terhadap *Carbon Emission Disclosure***

Eksplorasi mengenai dampak dimensi korporasi terhadap transparansi emisi karbon telah banyak dikaji dengan konklusi yang bervariasi. Memanfaatkan sampel emiten di Bursa Efek Indonesia, Syahdanti dan Marietza (2024) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memberikan imbas positif dan bermakna terhadap CED. Kesimpulan senada diperoleh Yulianti dan Waworuntu (2024) yang mengonfirmasi korelasi positif tersebut, berargumen bahwa entitas berskala besar didukung oleh kapabilitas sumber daya serta sorotan publik yang lebih masif, yang pada gilirannya mendorong kebijakan pengungkapan lingkungan yang lebih komprehensif.

Sebaliknya, temuan kontradiktif diajukan oleh Gunawan dan Aryati (2024) yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keterbukaan emisi karbon. Hal ini mengindikasikan bahwa besar

kecilnya korporasi tidak selalu menjadi patokan utama dalam keputusan pengungkapan emisi karbon, terutama apabila tidak didukung oleh tekanan regulasi atau insentif pelaporan yang memadai.

## **2. Penelitian terkait Profitabilitas terhadap *Carbon Emission Disclosure***

Serupa dengan variabel lainnya, hasil pengujian empiris mengenai pengaruh kemampuan menghasilkan laba (profitabilitas) terhadap CED juga diwarnai oleh ketidakselarasan hasil. Di satu sisi, Syahdanti & Marietza (2024) serta Yulianti dan Waworuntu (2024) menemukan bukti bahwa profitabilitas memiliki kontribusi positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Alasan utamanya adalah korporasi dengan perolehan keuntungan yang melimpah memiliki kelonggaran anggaran untuk mengalokasikan dana pada pelaporan operasional berbasis lingkungan.

Namun, di sisi lain, Gunawan dan Aryati (2024) mendapati fenomena sebaliknya, yaitu profitabilitas membawa pengaruh negatif terhadap tingkat keterbukaan informasi karbon. Di tengah perbedaan tersebut, Primalia dan Prasetyo (2025) serta Wahyuningrum *et al.* (2025) menyodorkan hasil netral yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dari profitabilitas terhadap CED. Adanya kesenjangan temuan ini mengindikasikan bahwa topik ini tetap menjadi bahan diskusi ilmiah yang relevan untuk dikaji ulang, terutama jika diselaraskan dengan jenis sektor usaha dan fluktuasi periode observasi yang bervariasi.

### 3. Penelitian terkait *Leverage* terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap CED turut menunjukkan hasil yang bervariasi. Mansour *et al.*, (2025) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap CED, yang dapat dijelaskan melalui tekanan dari kreditur kepada perusahaan untuk menjaga reputasi dan transparansi informasi non-keuangan sebagai bagian dari pengelolaan risiko.

Yulianti dan Waworuntu (2024) juga menemukan adanya pengaruh dari *leverage*, namun dengan arah yang negatif, artinya perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi justru cenderung mengurangi pengungkapan emisi karbon kemungkinan karena lebih fokus pada pemenuhan kewajiban finansialnya. Di sisi lain, Syahdanti dan Marietza (2024) serta Gunawan dan Aryati (2024) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap CED. Inkonsistensi temuan ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk kembali menguji pengaruh *leverage* dengan menggunakan sampel dan periode yang lebih terkini.

### 4. Penelitian terkait Likuiditas terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap CED telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda. Yulianti dan Waworuntu (2024) mengemukakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap CED. Korporasi dengan likuiditas yang tinggi dinilai memiliki kapasitas finansial jangka pendek yang lebih baik sehingga memungkinkan untuk mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan pelaporan dan pengungkapan informasi lingkungan, termasuk emisi karbon.

Berbeda dengan temuan tersebut, Gunawan dan Aryati (2024) menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap CED. Hasil yang tidak konsisten ini menunjukkan bahwa kemampuan korporasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya belum tentu secara langsung mendorong keputusan untuk transparansi informasi emisi karbon, karena pengungkapan tersebut lebih banyak didorong oleh faktor tekanan eksternal dan komitmen manajemen terhadap isu lingkungan.

Selain keempat variabel utama di atas, terdapat beberapa penelitian lain yang turut memperkaya landasan penelitian ini. Andrian dan Kevin (2021) menemukan bahwa *green strategy*, *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR), dan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif signifikan terhadap CED. (Aini *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa *financial slack* dan *media exposure* berpengaruh positif terhadap CED, sementara *institutional ownership* tidak terbukti signifikan. Haryanto dan Maharani (2024) menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan emisi karbon, sedangkan *financial constraint* tidak terbukti berpengaruh. Wahyuningrum *et al.* (2025) dalam dua penelitian berbeda menemukan bahwa *foreign listing status* dan *environmental performance* berpengaruh positif terhadap CED, sementara variabel tata kelola seperti *foreign board*, *foreign investor*, dan *independent board of commissioners* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran bahwa CED dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
Syاهدanti & Marietza (2024)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b> Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Paparan Media ( <i>Media Exposure</i> ), dan <i>Leverage</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, <i>media exposure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , namun <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
Yulianti & Waworuntu (2024)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b> Ukuran perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Media Exposure</i> , Likuiditas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>media exposure</i> , dan likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , sedangkan <i>leverage</i> cenderung berpengaruh negatif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
Gunawan & Aryati, (2024)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b> Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , sedangkan likuiditas, <i>leverage</i> , kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
Primalia & Prasetyo (2025)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b> <i>Corporate Governance</i> (CG), <i>Profitability</i> , <i>Working Capital</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . <i>Profitability</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . <i>Working capital</i> juga tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
Andrian & Kevin (2021)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>green strategy</i> , <i>corporate social responsibility disclosure</i> , dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh

Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Green Strategy, Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR), Good Corporate Governance (GCG)</i>	positif signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
(Aini <i>et al.</i> , 2021)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b> <i>Financial Slack, Institutional Ownership, Media Exposure</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>financial slack</i> dan <i>media exposure</i> berpengaruh positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , sedangkan <i>institutional ownership</i> tidak signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
Haryanto & Maharani (2024)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b> <i>Corporate Social Responsibility (CSR), Financial Constraint (kendala keuangan)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan <i>financial constraint</i> tidak berpengaruh dan tidak memediasi hubungan tersebut.
Wahyuningrum <i>et al.</i> , (2025)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b> <i>Foreign board, foreign investor, foreign listing status, dan board educational background</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>foreign listing</i> berpengaruh positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , sedangkan <i>foreign board, foreign investor, dan board educational background</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
Mansour <i>et al.</i> (2025)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b> <i>Leverage, Competition, Environmental Performance,</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. <i>Competition</i> (tingkat persaingan) juga berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . <i>Institutional ownership</i> dan <i>environmental performance</i> tidak

Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Institutional Ownership</i>	menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
Wahyuningrum <i>et al.</i> (2025)	<b>Dependen:</b> <i>Carbon Emission Disclosure</i> <b>Independen:</b> <i>Profitability, Company Age, Environmental Performance, Independent Board of Commissioners, Media Exposure</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>environmental performance</i> berpengaruh positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , sedangkan <i>profitability</i> dan <i>independent board</i> tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , serta <i>company age</i> dan <i>media exposure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .

### 2.3 Kerangka Pemikiran

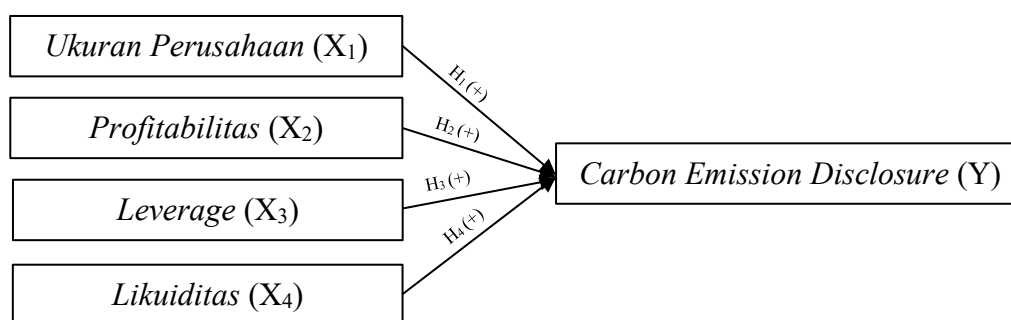
Riset Kerangka penelitian ini menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diuji untuk menjawab hipotesis penelitian, yang membangun kerangka pemikiran berlandaskan pada *legitimacy theory* (Suchman, 1995) sebagai landasan teoritis utama. Legitimasi perusahaan senantiasa diawasi oleh publik untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis sejalan dengan tatanan nilai dalam masyarakat, mengingat korporasi tidak hidup dalam keterpencilan sosial, dan upaya menjaga legitimasi ini difungsikan sebagai instrumen utama untuk memelihara kontrak sosial sekaligus membuktikan bahwa operasional perusahaan tetap patuh pada standar sosial yang diharapkan (Suchman, 1995; Deegan, 2002). Namun demikian, tidak semua perusahaan memiliki kapasitas yang sama untuk merespons tekanan legitimasi tersebut, karena kapasitas dan insentif perusahaan dalam merespons tekanan tersebut sangat ditentukan oleh karakteristik keuangannya (O'Donovan, 2002).

Korporasi dengan ukuran yang lebih besar menghadapi sorotan publik yang lebih intens sekaligus memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk memenuhi tuntutan transparansi lingkungan, sehingga dorongan untuk melakukan CED lebih besar (Cormier & Magnan, 2003; Choi *et al.*, 2013). Profitabilitas yang baik memberikan ruang finansial bagi perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya pada praktik pengungkapan lingkungan sebagai bagian dari upaya membangun dan mempertahankan reputasi yang baik di hadapan publik (Brigham & Houston, 2019). *Leverage* yang tinggi menempatkan perusahaan di bawah pengawasan ketat dari kreditur dan investor eksternal yang semakin peduli terhadap risiko lingkungan, sehingga mendorong korporasi untuk lebih transparan dalam mengungkapkan emisi karbonnya demi menjaga kepercayaan pemberi pinjaman (Ross *et al.*, 2019). Likuiditas yang memadai turut memberikan keleluasaan finansial bagi perusahaan untuk menjalankan praktik pengungkapan lingkungan secara konsisten tanpa harus mengorbankan kelangsungan operasional jangka pendeknya (Munawir, 2014).

Dengan demikian, *legitimacy theory* menjelaskan bahwa keputusan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon digerakkan oleh tekanan legitimasi dari luar yang mendorong perusahaan untuk membuktikan keselarasan operasionalnya dengan norma sosial yang berlaku. Karakteristik keuangan perusahaan berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas menjadi penentu seberapa besar kapasitas dan insentif perusahaan dalam merespons tekanan legitimasi tersebut melalui praktik CED.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1 sebagai berikut.

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Perusahaan Teori legitimasi berawal dari gagasan bahwa perusahaan hidup di atas kontrak sosial dengan masyarakat, sehingga kelangsungan usahanya sangat bergantung pada seberapa jauh aktivitasnya dinilai sejalan dengan nilai dan norma lingkungan yang berlaku. Di titik inilah ukuran perusahaan menjadi penting, karena semakin besar sebuah perusahaan energi, semakin besar pula skala operasinya dan semakin mudah jejak emisinya terpantau oleh investor, regulator, maupun masyarakat luas. Sorotan yang besar ini memunculkan apa yang disebut celah legitimasi, yaitu jarak antara ekspektasi publik dan realitas aktivitas perusahaan yang tergolong tinggi emisi. Sektor energi merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia dan menjadi sasaran utama program PROPER Kementerian Lingkungan Hidup serta kewajiban pelaporan keberlanjutan lewat

POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang keduanya merupakan bentuk nyata tekanan legitimasi.

Untuk menutup celah tersebut, perusahaan besar terdorong menyusun pengungkapan emisi karbon yang lengkap sebagai cara meyakinkan publik bahwa mereka tetap layak beroperasi. Perusahaan besar mempunyai sumber daya finansial dan sumber daya manusia yang jauh lebih memadai untuk menyiapkan pengungkapan itu. Kondisi ini berbeda dengan perusahaan energi kecil yang sorotan publiknya lebih ringan dan sumber dayanya terbatas, sehingga dorongan untuk mengungkapkan emisi secara menyeluruh pun ikut melemah. Dengan begitu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin luas pula CED yang dihasilkan. Logika ini diperkuat temuan Yulianti dan Waworuntu (2024) yang membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CED pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengacu pada argumentasi tersebut, kesimpulan sementara atau hipotesis kedua dalam riset ini diformulasikan sebagai berikut:

**H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

#### **2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Carbon Emission Disclosure***

Apabila ditinjau dari perspektif teori legitimasi, laba yang besar di sektor energi justru dapat menimbulkan risiko tersendiri. Publik akan mempertanyakan apakah keuntungan sebesar itu diraih dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan atau justru mengorbankannya. Perusahaan yang sangat menguntungkan juga secara otomatis lebih menonjol dan lebih diawasi, sehingga tekanan untuk

membuktikan bahwa keberhasilan finansialnya tidak melanggar ekspektasi lingkungan masyarakat pun ikut membesar. Pada situasi inilah pengungkapan emisi karbon berperan sebagai alat untuk menjaga legitimasi, yaitu cara perusahaan menunjukkan bahwa labanya diperoleh sembari tetap peduli terhadap lingkungan. Di sisi lain, profitabilitas yang tinggi juga menyediakan dana yang cukup untuk membiayai pengungkapan berkualitas, mulai dari pengukuran jejak karbon, audit lingkungan, hingga penyusunan laporan keberlanjutan yang seluruhnya membutuhkan biaya besar (Margaretha et al., 2024).

Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas, semakin besar tekanan legitimasi yang menyertai laba tersebut sekaligus semakin lapang ruang fiskal untuk membiayai pengungkapan tanpa mengganggu operasional inti, sehingga CED yang dihasilkan cenderung lebih luas dan berbobot (Fasya, 2024). Sebaliknya, perusahaan energi dengan profitabilitas rendah biasanya lebih memilih menjaga efisiensi biaya dan kelangsungan operasional terlebih dahulu, sehingga pengungkapan yang bersifat sukarela sering dikesampingkan atau disajikan seadanya. Pola ini sejalan dengan temuan Yulianti dan Waworuntu (2024) yang membuktikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap CED. Mengacu pada argumentasi tersebut, kesimpulan sementara atau hipotesis kedua dalam riset ini diformulasikan sebagai berikut:

**H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

### 2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Carbon Emission Disclosure*

*Leverage* menggambarkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang dari pihak luar untuk membiayai operasinya. Perusahaan sektor energi umumnya padat modal dan sangat menggantungkan proyek besarnya pada dana kreditur (IEA, 2021). Dalam teori legitimasi, kreditur bukan sekadar pemberi pinjaman biasa, melainkan penyedia sumber daya penting yang dukungannya ikut menentukan apakah perusahaan mampu terus bertahan dan dianggap layak beroperasi. Terlebih pada era keuangan berkelanjutan, kreditur semakin ketat menilai risiko lingkungan sebelum menyalurkan dana, sejalan dengan arah POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Hal ini berarti bahwa memenuhi harapan lingkungan dari kreditur pada dasarnya sama dengan memenuhi standar legitimasi yang telah menjadi bagian dari kesepakatan pembiayaan. Oleh sebab itu, utang yang besar menuntut manajemen tampil lebih transparan melalui pengungkapan non-keuangan agar legitimasinya di mata penyedia dana tetap terjaga dan risiko asimetri informasi dapat ditekan (Jaunanda & Putri, 2024).

Dengan demikian, semakin tinggi *leverage*, semakin besar ketergantungan perusahaan pada kreditur dan semakin kuat dorongan untuk menjaga legitimasi melalui pengungkapan emisi karbon yang meyakinkan bahwa risiko lingkungannya dikelola dengan baik. Sebaliknya, perusahaan dengan *leverage* rendah menghadapi tekanan penyedia dana yang lebih ringan, sehingga dorongan untuk memperluas pengungkapan pun lebih kecil. Logika ini didukung Mansour et al. (2025) yang membuktikan *leverage* berpengaruh positif terhadap CED pada berbagai

perusahaan di kawasan ASEAN. Mengacu pada argumentasi tersebut, kesimpulan sementara atau hipotesis ketiga dalam riset ini diformulasikan sebagai berikut:

**H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

#### **2.4.4 Pengaruh Likuiditas terhadap *Carbon Emission Disclosure***

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Apabila dihubungkan dengan teori legitimasi, ketersediaan dana lancar yang longgar atau yang sering disebut *financial slack* memberi keleluasaan bagi manajemen untuk mendanai kegiatan yang bertujuan menjaga legitimasi di luar operasi inti, salah satunya pelaporan dampak lingkungan (Rahman et al., 2025). Perusahaan dengan likuiditas tinggi berada dalam posisi keuangan yang stabil dan tidak terbebani kewajiban jangka pendek, sehingga memiliki ruang lebih untuk mengarahkan sumber dayanya pada pengungkapan lingkungan yang bersifat sukarela sebagai cara memperkuat citra dan mempertahankan legitimasinya di hadapan masyarakat maupun regulator.

Dengan demikian, semakin tinggi likuiditas, semakin mampu perusahaan menyisihkan dana untuk menyusun pengungkapan emisi karbon yang menyeluruh tanpa harus mengorbankan operasionalnya, sekaligus menegaskan dirinya sebagai perusahaan yang patuh terhadap ekspektasi sosial. Sebaliknya, perusahaan energi dengan likuiditas rendah cenderung memusatkan seluruh sumber dayanya untuk menutup kewajiban jangka pendek dan menjaga kelangsungan operasional, sehingga pengungkapan emisi karbon menjadi prioritas yang rendah. Pola ini ditemukan dalam penelitian Yulianti dan Waworuntu (2024) yang menunjukkan

likuiditas berpengaruh positif terhadap CED pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengacu pada argumentasi tersebut, kesimpulan sementara atau hipotesis keempat dalam riset ini diformulasikan sebagai berikut:

**H4: Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**